

Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia

Luis Fiska Rahayu

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa

luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

Corresponding author: luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

Submitted: 30/08/2025; Revised: 13/10/2025; Published: 20/10/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381>

Abstract

The Free Nutritious Meals (MBG) program is an Indonesian government initiative aimed at improving children's nutritional status and reducing stunting rates. Despite widespread support, the program faces a number of challenges, including food poisoning, implementation challenges, funding shortages, and suboptimal oversight. This study aims to evaluate the implementation of the MBG program based on field reports, public feedback, and central and regional government policies. The findings indicate that while the MBG program has significant potential for improving national nutrition, implementation and oversight are still needed. While the MBG program is a strategic step in improving the nutritional status of Indonesian children, its implementation remains far from ideal. Poisoning, logistical issues, and funding constraints must be addressed immediately through strengthened cross-agency coordination, improved supply chain management, and increased oversight capacity by the National Agency for National Development Planning (BGN) and regional governments. Recommendations for program strengthening include: A comprehensive evaluation of the distribution chain and production kitchens; Increased budget with a more efficient disbursement system; Community involvement in food quality monitoring; Implementation of strict food safety standards; Insurance and legal protection for beneficiaries. With improvements in these various aspects, the MBG has the potential to become a long-term program that not only reduces stunting rates but also fosters a healthy and productive generation.

Keywords: *Free Nutritious Meals, Public Policy, Poisoning, Supervision*

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan menekan angka stunting. Meskipun mendapatkan dukungan luas, program ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kasus keracunan, kendala pelaksanaan, kekurangan dana, hingga pengawasan yang belum optimal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG berdasarkan laporan lapangan, tanggapan publik, dan kebijakan pemerintah pusat serta daerah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki potensi besar dalam perbaikan gizi nasional, masih dibutuhkan penguatan aspek implementasi dan pengawasan yang lebih ketat. Program MBG merupakan langkah strategis dalam memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia, namun pelaksanaannya masih jauh dari ideal.

Kasus keracunan, masalah logistik, serta kendala pendanaan harus segera diatasi melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, perbaikan manajemen rantai pasok, dan peningkatan kapasitas pengawasan oleh BGN dan pemerintah daerah. Rekomendasi untuk penguatan program mencakup Evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan dapur produksi Penambahan anggaran dengan sistem pencairan yang lebih efisien Pelibatan masyarakat dalam pemantauan kualitas makanan Penerapan standar keamanan pangan yang ketat Asuransi dan perlindungan hukum bagi penerima manfaat Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, MBG berpotensi menjadi program jangka panjang yang tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga membentuk generasi yang sehat dan produktif.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Publik, Keracunan, Pengawasan

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025 melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 (Herniati & Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, 2025). Tujuan utamanya adalah memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak, khususnya dari keluarga berpendapatan rendah, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Syafiqoh, 2025).

Meskipun program ini telah menysasar lebih dari 3,3 juta penerima manfaat, implementasinya menuai berbagai kritik, terutama terkait keamanan pangan, efektivitas distribusi, dan efisiensi anggaran (Ritonga & Sazali, 2025). Argumen bahwa Program MBG adalah bagian dari strategi nasional yang bukan hanya teknis, tetapi juga sosial-politik dan ideologis. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi prevalensi stunting (Gratis et al., 2025). Program ini dirancang tidak semata-mata sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai strategi sistemik untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap makanan bergizi, sehat, dan aman. Kementerian Pertahanan (Kemhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) mengambil peran signifikan, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sulit diakses oleh institusi sipil (Kiftiyah et al., 2025). Salah satu contoh nyata adalah distribusi makanan di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang berhasil dilaksanakan dengan dukungan logistik dan keamanan dari TNI.

Kehadiran aparat keamanan juga berfungsi sebagai jaminan rasa aman bagi masyarakat penerima manfaat (Trisno Aji, 2025). Dukungan sosial terhadap program MBG terlihat dari keterlibatan para pemimpin adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal, yang tidak hanya menerima tetapi juga mempromosikan pentingnya gizi seimbang untuk masa depan anak-anak mereka. Pendekatan berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh aparat TNI bersama tokoh masyarakat berhasil meningkatkan akseptabilitas program, terutama di daerah dengan nilai-nilai sosial budaya yang kuat. Namun, tantangan tetap ada (Setyawan et al., 2025). Di beberapa wilayah seperti Papua, terdapat narasi yang menyimpang atau bahkan penolakan terhadap program oleh kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Fatimah et al., 2024). Salah satu isu yang diangkat adalah kekhawatiran terhadap keamanan pangan MBG. Informasi yang tidak akurat tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, pemerintah terus menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan dan edukasi gizi secara berkelanjutan (Qomarrullah et al., 2025). Badan Gizi Nasional (BGN) memainkan peran krusial dalam menjamin kualitas nutrisi makanan yang didistribusikan. Proses produksi diawasi secara ketat agar setiap makanan yang diterima sesuai dengan standar nasional gizi. Selain distribusi, aparat juga turut memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, yang diharapkan memperkuat perubahan perilaku konsumsi makanan secara berkelanjutan (Nurul Azzahra et al., 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan (Usulan et al., 2025). Program ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka stunting, gizi buruk, serta ketimpangan akses terhadap makanan sehat di berbagai daerah. Namun, implementasi program ini tidak terlepas dari dinamika politik yang mewarnai proses perumusan hingga pelaksanaannya (Etuk et al., 2024). Dukungan politik terhadap MBG menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan program, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap aktor politik memiliki pandangan, kepentingan, dan strategi yang berbeda dalam menafsirkan serta mengawal kebijakan tersebut (Merlinda & Yusmar Yusuf, 2025).

Di satu sisi, program MBG mendapat dukungan kuat karena dianggap sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, terutama generasi muda. Banyak pihak menilai kebijakan ini selaras dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)(Ritonga & Sazali, 2025). Namun di sisi lain, terdapat resistensi politik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa program ini memiliki motif elektoral, terutama karena muncul dalam konteks kontestasi politik nasional. Persoalan pembiayaan, efektivitas sasaran, hingga kesiapan infrastruktur daerah juga menjadi bahan perdebatan di antara partai politik dan lembaga legislatif(Kiftiyah et al., 2025). Dinamika dukungan politik terhadap MBG mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan politik. Proses legislasi anggaran, pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, serta tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali mempengaruhi jalannya program. Selain itu, perbedaan persepsi antara elite politik dan masyarakat mengenai urgensi serta mekanisme pelaksanaan MBG turut membentuk arah dukungan yang fluktuatif. Oleh karena itu, memahami dinamika politik dalam konteks dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat bertransformasi menjadi program berkelanjutan yang benar-benar berpihakpada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat legitimasi politik sesaat(Oktawila & Bagijo, 2025).

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup pembahasan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kebijakan publik, dukungan politik, dan kebijakan sosial berbasis kesejahteraan. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting untuk menjelaskan bagaimana faktor politik memengaruhi proses perumusan dan implementasi program kebijakan di Indonesia (Albaburrahim et al., 2025).

1. Teori Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye (2008), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, kebijakan ini dapat dipahami sebagai intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok miskin. Proses pembentukan kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai tahapan mulai dari perumusan agenda, formulasi, adopsi, implementasi hingga evaluasi. Setiap tahap melibatkan aktor politik, birokrasi, dan masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang menekankan bahwa kebijakan publik selalu merupakan hasil dari interaksi antara kekuasaan politik dan kebutuhan sosial (Febryanti et al., 2025).
2. Teori Dukungan Politik Dukungan politik merupakan salah satu faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut David Easton (1965) dalam model sistem politiknya, dukungan (support) dari masyarakat dan elite politik merupakan input penting bagi stabilitas sistem politik. Tanpa adanya dukungan yang memadai, kebijakan publik cenderung menghadapi hambatan dalam pelaksanaan. Dalam konteks Program MBG, dukungan politik dapat muncul dalam bentuk persetujuan legislatif terhadap anggaran, dukungan partai terhadap kebijakan pemerintah, serta penerimaan masyarakat terhadap tujuan program. Namun, dukungan ini bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai dengan konteks politik, kepentingan partai, dan persepsi publik terhadap efektivitas program (Auliawan & Harsiwi, 2025).
3. Teori Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan Program Makan Bergizi Gratis juga dapat dikaji melalui teori kebijakan sosial yang berfokus pada upaya negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Menurut Spicker (2008), kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. MBG sebagai kebijakan sosial dirancang untuk memperbaiki status gizi anak dan mengatasi masalah ketimpangan pangan. Namun, efektivitas

kebijakan sosial sangat bergantung pada dukungan politik dan kelembagaan yang kuat. Tanpa dukungan politik yang konsisten, kebijakan sosial sering kali berhenti pada tataran simbolik atau hanya berlangsung selama periode pemerintahan tertentu (Com, 2025).

Dinamika Politik dalam Implementasi Kebijakan Dinamika politik dalam implementasi kebijakan publik dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada koordinasi antar-aktor, komunikasi kebijakan, serta stabilitas politik. Dalam kasus Program MBG, dinamika ini terlihat dari adanya perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan daerah terkait mekanisme pendanaan dan pelaksanaan. Selain itu, dukungan politik yang muncul sering kali dipengaruhi oleh konteks elektoral dan citra politik pemerintah.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disusun kerangka konseptual bahwa dukungan politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis merupakan hasil dari interaksi antara kepentingan politik, proses kebijakan publik, dan tujuan kesejahteraan sosial. Dukungan politik yang stabil dan berkelanjutan akan memperkuat legitimasi serta efektivitas program, sedangkan dinamika dukungan yang fluktuatif berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan dan menurunkan keberlanjutan program. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa studi mengenai dinamika dukungan politik terhadap MBG tidak hanya membahas aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga harus memahami relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang memengaruhi arah kebijakan sosial di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, aktor, dan konteks politik yang memengaruhi dukungan terhadap program MBG, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai bentuk dukungan, penolakan, serta faktor- faktor yang memengaruhi dinamika kebijakan tersebut. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang relevan, seperti anggota legislatif, pejabat kementerian terkait, perwakilan partai politik, pemerintah daerah, serta akademisi atau pengamat kebijakan publik. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan langsung mengenai proses politik di balik pelaksanaan MBG. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, seperti naskah kebijakan, hasil rapat DPR, berita media massa, laporan kebijakan, dan literatur akademik yang membahas isu gizi dan kebijakan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur, agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada pokok permasalahan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting yang relevan dengan dinamika dukungan politik, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis, sedangkan kesimpulan diperoleh melalui interpretasi mendalam terhadap pola dukungan dan resistensi politik yang ditemukan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan selama periode Juli hingga Oktober 2025 di beberapa lokasi strategis, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DPR RI, dan sejumlah pemerintah daerah percontohan pelaksana program MBG. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana faktor politik, kepentingan partai, dan kebijakan pemerintah berinteraksi dalam membentuk arah serta keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Pembahasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Program ini dirancang sebagai intervensi sosial dan ekonomi yang tidak hanya menyoar aspek kesehatan anak, tetapi juga mengandung dimensi politik, ekonomi, dan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks politik, MBG menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap isu-isu kesejahteraan publik sekaligus menjadi arena kontestasi dukungan antara berbagai aktor politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan berikut mengurai dinamika dukungan politik terhadap MBG dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan, perdebatan kebijakan, dan tantangan implementasinya di lapangan.

Konteks Politik dan Latar Belakang Program MBG Program Makan Bergizi Gratis lahir di tengah meningkatnya kesadaran nasional akan pentingnya investasi pada kualitas gizi generasi muda. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi permasalahan stunting, anemia, dan kekurangan gizi kronis yang berdampak pada produktivitas jangka panjang. Dalam visi pembangunan nasional, peningkatan kualitas manusia menjadi fokus utama, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, gagasan MBG tidak sekadar proyek sosial, melainkan strategi pembangunan manusia yang memiliki dimensi politis yang kuat. Konteks politik di balik lahirnya MBG juga tidak lepas dari dinamika elektoral. Program ini menjadi salah satu janji kampanye yang digadang-gadang untuk memperkuat legitimasi politik kandidat yang mengusung agenda kesejahteraan sosial. Banyak pihak melihat MBG sebagai kebijakan populis yang potensial menarik simpati publik, terutama dari kalangan orang tua, guru, dan komunitas sekolah. Namun demikian, dukungan politik terhadap program ini tidak serta-merta solid, karena berbagai pihak mempertanyakan aspek keberlanjutan pendanaan, efektivitas distribusi, dan kapasitas institusi pelaksana.

Aktor dan Kepentingan dalam Dukungan Politik Dukungan terhadap MBG melibatkan beragam aktor dengan kepentingan yang berbeda. Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan

Kementerian Sosial memiliki peran dominan dalam perencanaan dan penganggaran. Dukungan politik dari parlemen, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga menjadi penentu karena proses pengesahan anggaran harus melalui persetujuan politik. Sebagian anggota legislatif memandang program MBG sebagai langkah positif untuk menurunkan angka stunting, tetapi ada pula yang menilai program ini sebagai beban fiskal tambahan di tengah keterbatasan anggaran. Sementara itu, di tingkat daerah, kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program melalui penyesuaian kebijakan daerah dan pengalokasian dana pendamping. Dukungan politik di tingkat lokal sering kali bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dengan partai politik pendukung pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, kepala daerah dari partai oposisi menunjukkan sikap kritis terhadap MBG karena menganggapnya terlalu sentralistik dan kurang melibatkan inisiatif daerah.

Kelompok masyarakat sipil, LSM, dan organisasi profesi kesehatan juga menjadi bagian dari aktor pendukung, meskipun dukungan mereka cenderung berbasis pada aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, bukan politik elektoral. Namun, dinamika dukungan dari masyarakat sipil sering kali memengaruhi legitimasi publik terhadap program ini. Ketika implementasi MBG dianggap berhasil memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekolah, maka dukungan sosial terhadap pemerintah meningkat secara signifikan.

Dimensi Populisme dan Politik Kesejahteraan MBG sering dipandang sebagai manifestasi politik populisme kesejahteraan (welfare populism). Program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan dan gizi, yang bersifat universal dan mudah dipahami publik. Dalam kerangka politik, kebijakan seperti MBG menjadi instrumen untuk memperkuat citra pemerintah sebagai pengayom rakyat kecil. Hal ini tampak dalam strategi komunikasi politik yang menonjolkan narasi “pemerintah hadir untuk anak bangsa” atau “investasi gizi untuk masa depan Indonesia”. Namun demikian, dimensi populisme ini juga menimbulkan kritik. Beberapa analis kebijakan menilai bahwa MBG berpotensi menjadi kebijakan jangka pendek yang tidak diiringi reformasi struktural di sektor pangan dan pendidikan. Kekhawatiran muncul bahwa program ini lebih

menonjolkan aspek simbolik ketimbang keberlanjutan sistemik. Oleh karena itu, dukungan politik yang bersifat sementara terutama menjelang pemilihan umum dapat memengaruhi kontinuitas kebijakan setelah pergantian pemerintahan. Dinamika ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap MBG bersifat fluktuatif, tergantung pada momentum politik dan posisi para aktor dalam struktur kekuasaan. Jika program ini dianggap menguntungkan secara elektoral, maka dukungan akan menguat; namun jika dianggap membebani fiskal atau berpotensi menimbulkan kritik publik, dukungan dapat berkurang drastis.

Tantangan Implementasi dan Respons Politik Salah satu isu krusial dalam dinamika dukungan terhadap MBG adalah implementasinya di lapangan. Banyak daerah menghadapi kendala terkait logistik, infrastruktur sekolah, distribusi bahan pangan, dan kapasitas pengawasan. Program ini menuntut koordinasi lintas sektor yang kompleks, mulai dari penyediaan bahan makanan lokal, pengolahan, hingga pengawasan gizi anak. Dalam konteks ini, dukungan politik berperan penting untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas kebijakan. Beberapa daerah menunjukkan inisiatif yang kuat dengan memanfaatkan produk pangan lokal untuk mendukung program MBG, sehingga selain meningkatkan gizi anak, program ini juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun di daerah lain, pelaksanaan program menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran pendamping dan kurangnya dukungan birokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik tidak hanya berarti persetujuan kebijakan di atas kertas, tetapi juga komitmen nyata dalam penyediaan sumber daya. Selain itu, resistensi politik juga muncul dari kelompok yang mempertanyakan efektivitas program. Beberapa kalangan menilai bahwa MBG dapat menimbulkan ketergantungan baru dan tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Kritik ini sering datang dari ekonom dan partai oposisi yang menilai bahwa program tersebut belum memiliki mekanisme evaluasi yang transparan dan terukur. Dalam konteks ini, dukungan politik harus diimbangi dengan pengawasan publik yang kuat agar MBG tidak sekadar menjadi proyek pencitraan.

Peran Media dan Persepsi Publik Media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap MBG. Pemberitaan yang positif mengenai

keberhasilan program dapat memperkuat dukungan politik, sementara kritik terhadap kegagalan implementasi dapat menurunkan legitimasi. Pemerintah secara strategis menggunakan narasi gizi dan pendidikan sebagai bentuk komunikasi publik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Narasi ini efektif karena menyentuh aspek emosional dan moral, yakni tanggung jawab kolektif terhadap anak-anak bangsa. Namun, dinamika media juga memperlihatkan adanya polarisasi pemberitaan. Media yang berafiliasi dengan partai politik tertentu sering kali menampilkan framing yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya isu sosial, tetapi juga alat politik komunikasi dan kontestasi wacana antara pemerintah dan oposisi. Perbedaan persepsi ini memengaruhi arah dukungan politik, baik di parlemen maupun di kalangan pemilih. Kebijakan Fiskal dan Perdebatan Anggaran Dukungan politik terhadap MBG juga sangat dipengaruhi oleh aspek fiskal. Program ini membutuhkan alokasi dana yang besar dan berkelanjutan, karena melibatkan jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Dalam pembahasan anggaran di DPR, muncul perdebatan tentang sumber pendanaan dan efisiensi penggunaan APBN. Beberapa fraksi politik menilai bahwa dana besar untuk MBG harus diimbangi dengan reformasi pengelolaan gizi dan transparansi pelaksanaan.

Pemerintah berupaya menjawab kritik tersebut dengan mengintegrasikan MBG ke dalam kebijakan lintas sektor seperti program ketahanan pangan nasional, pemberdayaan UMKM pangan lokal, dan pencegahan stunting. Integrasi ini dimaksudkan agar program tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional. Namun, tantangan tetap ada dalam hal sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan konsistensi dukungan politik lintas periode pemerintahan.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam kerangka otonomi daerah, dukungan politik terhadap MBG sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Implementasi di lapangan membutuhkan adaptasi terhadap kondisi lokal, baik dari segi kebutuhan gizi, pola konsumsi masyarakat, maupun kemampuan fiskal daerah. Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dapat melaksanakan MBG secara mandiri dengan kualitas yang lebih baik, sementara daerah lain dengan kemampuan fiskal rendah bergantung penuh pada dukungan pusat. Kesenjangan ini

menciptakan disparitas dukungan politik, di mana kepala daerah dari partai pendukung pemerintah cenderung lebih antusias, sedangkan daerah oposisi menampilkan sikap skeptis. Dalam konteks ini, stabilitas dukungan politik menjadi kunci agar MBG dapat berjalan secara merata di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi vertikal melalui mekanisme insentif fiskal bagi daerah yang mendukung implementasi program.

Implikasi Sosial dan Politik Jangka Panjang Dukungan politik terhadap MBG tidak hanya berdampak pada keberhasilan program, tetapi juga pada pola relasi negara dan masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat legitimasi politik dan memperdalam budaya partisipasi publik dalam program sosial. Sebaliknya, jika program gagal atau terhenti karena perubahan rezim, masyarakat dapat mengalami kekecewaan yang berdampak pada penurunan kepercayaan politik. Secara sosial, MBG berpotensi menjadi katalis perubahan perilaku gizi di masyarakat. Program ini mengajarkan pentingnya pola makan sehat dan seimbang sejak usia dini. Namun keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika dukungan politik disertai dengan komitmen kelembagaan, monitoring yang transparan, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan di tingkat lokal.

Konsolidasi Dukungan dan Strategi Keberlanjutan Agar dukungan politik terhadap MBG berkelanjutan, diperlukan konsolidasi lintas aktor. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan DPR, kepala daerah, dan masyarakat sipil untuk membangun persepsi positif terhadap manfaat program. Strategi keberlanjutan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: (1) integrasi kebijakan MBG dengan program nasional lain seperti ketahanan pangan dan pendidikan karakter; (2) diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan publik-swasta; dan (3) penguatan regulasi untuk menjamin keberlanjutan program lintas pemerintahan. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme evaluasi berbasis data. Transparansi hasil pelaksanaan dapat menjadi dasar rasional bagi dukungan politik yang lebih objektif. Ketika bukti empiris menunjukkan penurunan angka malnutrisi dan

peningkatan partisipasi sekolah, maka dukungan lintas partai akan lebih mudah diperoleh karena program terbukti berdampak positif secara sosial-ekonomi.

Dinamika dukungan politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia mencerminkan interaksi kompleks antara kebijakan publik, kepentingan politik, dan realitas sosial. MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga simbol tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dukungan politik terhadap program ini berfluktuasi sesuai konteks elektoral, kondisi fiskal, dan efektivitas implementasi di lapangan. Keberhasilan MBG bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu membangun konsensus lintas aktor politik dan menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Dengan dukungan politik yang kuat, program MBG dapat menjadi model kebijakan sosial yang berkelanjutan — tidak sekadar proyek populis, melainkan investasi nyata dalam masa depan generasi bangsa.

Beberapa kasus keracunan makanan yang terkait dengan program MBG dilaporkan terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Bogor dan Palembang. Ratusan siswa mengalami gejala keracunan akibat konsumsi makanan yang diduga terkontaminasi bakteri. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyalahkan insiden tersebut dan menyatakan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap kasus ini. Komisi IX DPR RI juga menilai bahwa kejadian berulang ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam proses produksi dan distribusi makanan, serta urgensi evaluasi total oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selain masalah keracunan, pelaksanaan program MBG dinilai belum optimal. Kritik muncul terkait dapur penyedia makanan yang harus tutup karena dana belum cair, makanan yang sampai dalam kondisi basi, dan distribusi yang sering kali terlambat. DPRD Sumatera Selatan menyoroti pelaksanaan uji coba MBG di lima sekolah di Palembang dan menyebut bahwa program ini "tidak akan tepat sasaran" jika tidak ada pembenahan. Hal ini mencerminkan bahwa masalah implementasi bersifat sistemik dan membutuhkan solusi struktural, bukan hanya administratif. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk MBG, masih terdapat kekhawatiran mengenai kecukupan anggaran. BGN menyatakan kebutuhan akan tambahan dana untuk memastikan cakupan program dapat diperluas. Pemerintah

berupaya menyesuaikan anggaran lintas sektor, namun keterlambatan pencairan anggaran menjadi salah satu penyebab hambatan operasional di lapangan. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto mengakui insiden keracunan, tetapi menekankan bahwa jumlah kasus masih relatif kecil dibandingkan jumlah total penerima (sekitar 200 dari 3 juta orang). Di sisi lain, DPR RI tidak secara resmi memprotes program karena MBG sudah memiliki legitimasi hukum melalui Perpres dan Inpres. Namun, DPR lebih menekankan pada aspek pengawasan dan evaluasi. DPRD di tingkat daerah terlihat lebih vokal karena mereka langsung bersentuhan dengan pelaksanaan di lapangan. BGN telah merancang sistem asuransi bagi penerima manfaat MBG untuk mengantisipasi risiko kecelakaan selama produksi dan distribusi. Terlepas dari tantangan, program ini juga mendapatkan apresiasi, termasuk dari tokoh internasional seperti Bill Gates. MBG dinilai memiliki potensi besar dalam membentuk kebiasaan hidup sehat serta memberikan dukungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dari keluarga miskin. Hingga awal Mei 2025, MBG telah menjangkau sekitar 3,3 juta anak. Pemerintah berencana memperluas cakupan program untuk menjangkau lebih banyak daerah dan kelompok rentan. Namun, perlu strategi yang matang agar perluasan tersebut tidak memperburuk permasalahan yang sudah ada.

Program MBG merupakan representasi dari komitmen nasional terhadap kesejahteraan generasi masa depan, khususnya dalam hal gizi dan kesehatan anak. Dukungan politik dari lembaga legislatif seperti DPR RI, dukungan sosial dari masyarakat akar rumput, dan dukungan operasional dari lembaga pertahanan seperti TNI menunjukkan bahwa MBG bukan hanya kebijakan teknokratis, tetapi juga simbol amanah moral bangsa. Kendati demikian, tantangan dalam pelaksanaan seperti insiden keracunan, distribusi tidak merata, dan penyebaran disinformasi harus menjadi perhatian serius. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan berbagai pihak—termasuk kelompok yang berbeda pandangan politiknya—untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Dengan pendekatan kolaboratif, berbasis bukti, dan menghormati kearifan lokal, Program MBG memiliki

potensi besar untuk menjadi warisan kebijakan jangka panjang yang mengubah wajah kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia

Kesimpulan

Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari DPR RI dapat dipahami dalam konteks hubungan antara legislatif dan eksekutif yang saat ini harmonis. Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat sejak 2024, memperoleh dukungan politik yang signifikan dari mayoritas fraksi di DPR. Dalam konteks ini, DPR RI tidak menunjukkan penolakan eksplisit terhadap program MBG meskipun terdapat berbagai permasalahan di lapangan, seperti kasus keracunan makanan. Ketidakhadiran kritik keras dari DPR pusat bukan semata-mata karena absennya masalah dalam pelaksanaan program, melainkan lebih mencerminkan tingginya dukungan politik terhadap pemerintahan yang sedang menjabat. Program MBG dilindungi oleh kerangka hukum yang kuat, seperti Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Inpres No. 1 Tahun 2025, yang memberikan legitimasi hukum yang sulit diperdebatkan tanpa konsekuensi politik. Sebaliknya, fungsi pengawasan legislatif lebih terlihat di tingkat DPRD (daerah), yang relatif lebih otonom dan dekat dengan pelaksanaan teknis program. Kritik terhadap program MBG, terutama dalam kasus keracunan di Kota Bogor dan distribusi di Palembang, lebih banyak datang dari DPRD setempat dibanding dari DPR pusat. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa posisi DPR RI yang cenderung tidak menolak program MBG secara langsung merefleksikan tingginya dukungan politik terhadap Presiden dan agenda kebijakan pemerintah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya peran pengawasan yang harus dijalankan secara objektif demi efektivitas kebijakan dan perlindungan publik.

Daftar Pustaka

Albaburrahim, Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, Agik Nur Efendi, M. A. A., Sahrul Romadhon, & Liana Rochmatul Wachidah. (2025). ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Special Edition: Renaisans 1 st International Conference of Social Studies. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu- Ilmu Sosial Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

- <https://doi.org/10.19105/Ejpis.V1i.19191>. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Auliawan, A. G., & Harsiwi, W. (2025). Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Kiryoku*, 9(1), 184–197. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v9i1.184-197>
- Com, D. A. N. K. (2025). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PADA MEDIA ONLINE KOMPAS . COM ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PADA MEDIA ONLINE KOMPAS . COM DAN KUMPARAN . COM. 3(9).
- Detik.com. (2025). Makan Bergizi Gratis di Palembang Disorot, DPRD: Tidak Akan Tepat Sasaran!
- DW Indonesia. (2025). Kasus Keracunan MBG, Prabowo: 200 Orang dari 3 Juta Penerima Manfaat.
- Etuk, U., Umoren, I., Umoren, O., & Inyang, S. (2024). Realtime-Based System for Facemask Detection Using PCA, with CNN and COCO Model. *Journal of Information Systems and Informatics*, 6(2), 1114–1131. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i2.759>
- Fatimah, S., Rasyid, A., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur : Tantangan , Implementasi , dan Solusi untuk Ketahanan Pangan Pendahuluan. *Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, Dan Olusi Untuk Ketahanan Pangan*, 4(1), 14–21.
- Febryanti, I., Alwiadi Pane, M., Astuti, P., & Administrasi dan Bisnis, F. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–079. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Gratis, B., Dasar, S., & Inpres, N. (2025). I-Com : Indonesian Community Journal Program Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun Sebelum Konsumsi Makanan. 5(2), 858–867.
- Herniati, N., & Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, I. (2025). Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Aura*, 6(1), 88–98. <https://doi.org/10.37216/aura.v6i1.2484>
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Merlinda, A. A., & Yusmar Yusuf. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1360>
- Nurul Azzahra, Akbar Dwi Dharmawan, Aras Fikar Mardatilah, Mohamad Ilham Habibi, Virliana Amanda Putri Aryani, & Suhardi. (2025). Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 4 Tangerang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5036–5044. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>

- Oktawila, D., & Bagijo, H. E. (2025). Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]. Jurnal Media Informatika {JUMIN}, 6(3), 1595–1602.
- Qomarrullah, R., Suratni, Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan the Long-Term Impact of the Free Nutritious Meal Program on Health and Educational Sustainability. *Intelek Madani*, 5(2), 130–136.
<https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/660/483>
- Ritonga, A. R., & Sazali, H. (2025). Analisis komunikasi pembangunan terhadap regulasi dan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. *Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 32–40. <https://e-journal.samsarainstitute.com/jhpm/article/view/77/36>
- Setyawan, E., Rianto, Kusuma Wardana, Sugihartanto, Rizal Angko Pratama, & Malik Ibrahim. (2025). Analisis Wacana Berita Hoaks tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menggunakan Pendekatan Socio-Cognitive Teun A. van Dijk. *Jurnal Audiens*, 6(2), 254–277. <https://doi.org/10.18196/jas.v6i2.607>
- Syafiqoh, I. (2025). Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini di Lamongan. 1020(1), 1–6.
- Trisno Aji, W. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Usulan, A., Dana, P., Virlana, B., Tjoneng, A., Digital, B., Maranatha, U. K., Digital, B., & Maranatha, U. K. (2025). Morality : jurnal ilmu hukum Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis : Kajian. 11(1), 57–82.
- Wawancara dan pernyataan Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, April 2025